

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Medan adalah ibukota propinsi Sumatera Utara dengan jumlah populasi pada tahun 2016 sebanyak 2,228,408 jiwa dengan luas area seluas 265.10 km². Kota Medan terdiri dari 21 kecamatan dan 151 kelurahan. Masing masing kecamatan tersebut adalah : Medan Barat, Medan Baru, Medan Timur, Medan Area, Medan Kota, Medan Polonia, Medan Petisah, Medan Johor, Medan Tuntungan, Medan Helvetia, Medan Sunggal, Medan Labuhan, Medan Deli , Medan Belawan, Medan Tembung Marelan, Medan Maimun, Medan Selayang , Medan Denai, Medan Perjuangan, Medan Marelan, Medan Tuntungan. Orang Melayu dapat dikatakan sebagai tuan rumah atau kelompok etnis pertama yang berdiam di daerah ini, karena itu mereka disebut sebagai tuan rumah (host population) Selanjutnya diikuti oleh kelompok etnis lainnya seperti : Karo, Simalungun, Fak Fak Dairi, Toba, Sipirok, Mandailing, Angkola, Melayu Pesisir, Minangkabau, Aceh,, Jawa, Cina, India, Sunda, Arab, Bugis dan Nias.¹

Kota Medan adalah potret sebuah kota multietnik dan ini merupakan realitas sejarah dan budaya yang tidak bisa dipungkiri. Fakta ini seharusnya tidak dilihat dalam artian negatif tapi merupakan sebuah potensi modal sosial yang dapat digunakan untuk membangun daerah ini. Secara khusus dalam hal pembangunan politik yakni pada saat memilih pemimpin melalui kegiatan Pemilihan Umum. Realitas etnik merupakan sebuah potensi yang bisa dijadikan

[1] ¹ Pelly, Usman": Etnisitas dalam Politik Multikultural, Buku III, Casamesra Publisher, Medan, 2016

sebagai salah satu sumber perolehan dukungan suara atau kantong suara pada setiap pemilihan.

Berdasarkan riset yang pernah dilakukan oleh EM. Bruner, Antropolog Amerika, sebagaimana yang dikutip oleh Usman Pelly (1994)² bahwa di Kota Medan tidak ada budaya dominan. Artinya semua etnik memiliki potensi, karakteristik dan preferensi yang spesifik. Hal ini dapat dilihat melalui pola pola pemukiman, pekerjaan dan orientasi dari masing masing kelompok etnik dalam realitas kehidupan sehari hari. Karena keberagamannya ini, Kota Medan selain diakui sebagai kota multietnik, tapi sekaligus merupakan kota terbesar ketiga setelah Jakarta dan Surabaya. Bahkan karena realitas keberagamannya ini, Kota Medan sesungguhnya menggambarkan sebuah miniatur tentang Indonesia.

Bahkan dalam salah satu hasil penelitiannya Bruner menuliskan istilah kerabat dan bukan kerabat untuk menggambarkan tentang dinamika etnisitas yang ada di Kota Medan. Hal ini sebagaimana terungkap dalam buku "*Pokok Pokok Antropologi Budaya*" dengan editor T.O. Ihromi.³ Tesis tentang Orang Batak dan Bukan Orang Batak di Kota Medan semakin menguatkan dalil bahwa pembedaan yang pertama sekali dibuat dalam rangka hubungan antarpribadi di Indonesia adalah atas dasar kesukuan.

Pola pemukiman yang ada di Kota Medan sebagaimana mengacu dari Usman Pelly (1994) merupakan sekelompok rumah yang menggambarkan pemukiman perantau. Dalam kelompok pemukiman ini hubungan hubungan dan kegiatan kegiatan sosial tradisional kelompok etnik dari kampung halaman mereka akan tetap dipertahankan. Pemukiman berdasarkan pengelompokan etnik

[2] ² Pelly, Usman, *Urbanisasi dan Adaptasi: Peran Missi Budaya Minangkabau dan Mandailing*, LP3ES, Jakarta, 1994

³ TO. Ihromi dalam *Pokok Pokok Antropologi Budaya*, Gramedia, Jakarta, 1987

ini telah menjadi ciri khas Kota Medan sejak awal abad 20. Sebagai contoh pemukiman Minangkabau dan Cina cenderung terkonsentrasi dekat pusat bisnis di pusat kota; etnis Batak Toba dan Mandailing tersebar di daerah pinggiran. Sementara Orang Melayu menguasai tanah yang luas dan memiliki banyak rumah di kota terutama di daerah seperti Kota Maksim, Kampung Mesjid, Sei Rengas, Petisah, Silalas dan Sei Agul. Namun karena orang Melayu tidak menempati posisi strategis dalam bisnis atau pemerintahan, maka setelah kemerdekaan mereka mulai terdesak keluar kota. Kebanyakan tanah dan rumah orang Melayu telah dijual kepada kaum pendatang (Pelly, 1994)

Dari segi pendidikan, Kota Medan meskipun tidak bisa disebut sebagai Kota Pendidikan sebagaimana halnya dengan Kota Jogjakarta atau Bandung, namun dengan eksistensi berbagai institusi pendidikan baik yang dikelola negeri maupun swasta dari mulai tingkat dasar hingga universitas cukup memberi gambaran bahwa warga Kota Medan cukup *well educated*. Berdasarkan data statistik Kota Medan tahun 2017 jumlah sarana pendidikan tingkat SD ada sebanyak 851; SMP sebanyak 366; SMA sebanyak 209; SMK sebanyak 155. Sedangkan untuk tingkat perguruan tinggi, di Kota Medan terdapat beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Diantaranya adalah Universitas Sumatera Utara dengan jumlah dosen sebanyak 1.519 dan mahasiswa sebanyak 58.830 ; Universitas Islam Negeri dengan jumlah dosen sebanyak 483 dan mahasiswa sebanyak 13.921; Universitas Negeri Medan dengan jumlah dosen sebanyak 938 dan mahasiswa sebanyak 22.207 (BPS Kota Medan, 2017).

Dari segi demografi dan geografi, penduduk Kota Medan terbilang sangat heterogen. Ada beberapa suku bangsa berdiam di kota ini dan satu sama lain

saling hidup berdampingan. Keberagaman adalah sebagai penanda kuat bahwa Medan adalah kota multietnik Keberagaman sekaligus merupakan potensi modal sosial bagi daerah ini yang dapat digunakan sebagai penopang pembangunan. Potret keberagaman yang ada di Kota Medan sekaligus menggambarkan realitas keberagaman penduduk yang ada di Indonesia.

Dari hasil sensus penduduk nasional tahun 2010 tercatat ada 5 suku bangsa dengan populasi yang cukup besar, yakni etnis Jawa menduduki rangking pertama sebagai etnis yang paling banyak jumlah penduduknya di negeri ini, dengan jumlah sebesar 40.22 %. Selanjutnya diikuti oleh etnik Sunda, sebesar 15.5 % pada posisi kedua; etnik Batak sebesar 3.58 % pada posisi ketiga. Diikuti oleh suku suku yang ada di Sulawesi sebanyak 4 % pada posisi keempat; dan diurutan kelima di diduduki oleh Suku Madura 3.03 %.

Sementara itu, di Sumatera Utara gambaran komposisi jumlah penduduk dan distribusi etnik yang ada baik di Sumatera Utara dan Kota Medan khususnya berdasarkan hasil sensus tahun 2010 sebagaimana mengacu dari Akhir Matua Harahap adalah sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabre 1. Distribusi Etnik Sumut dan Medan Tahun 2010

Distribusi Etnik di Sumatera Utara dan Kota Medan tahun 2010		
Suku Bangsa	Propinsi Sumatra Utara	Kota Medan
Angkola-Mandailing	13:54	10:16
Karo	5:49	4.62
Dairi	0.78	0:42

Simalungun	2:50	1:41
Pesisir	1:38	1:10
Toba	20.83	17:12
Nias	7:01	1:10
Minangkabau	2.61	7.83
Melayu	4:42	5.76
Jawa	33.47	33.19
China	2.63	9:47
Aceh	0.95	2.70
Banjar	0.99	0:47
Others	3:40	4.65
Total	100.00	100.00

Sumber: Data olahan Sensus tahun 2010, oleh Akhir Matua Harahap (2016)

Selanjutnya Harahap melakukan analisis dan olahan terhadap data etnik sekaligus melakukan komparasi distribusi etnik yang ada di Kota Medan antara tahun 1930 dan 2010 dengan hasil sebagaimana tergambar di bawah ini:

Tabel 2. Penduduk Kota Medan menurut Etnik

Penduduk Kota Medan Menurut Etnik		
	1930	2010
Batak	7.7	34.6
Jawa	24.9	33.2
Tionghoa	35.6	9.5
Melayu	7.1	7.0
Minangkabau	7.3	7.8
Nias	-	1.1
Aceh	-	2.7
Eropa/Belanda	5.6	-
Asia lainnya	4.9	-
Lainnya	6.9	6.8
Total	100.0	100.0

Sumber: Persentase Etnik di Kota Medan, 1930 dan 2010
Hasil olah data oleh Akhir Matua Harahap (2016)

Berdasarkan Sensus Penduduk 1930, penduduk Kota Medan sudah terlihat sangat beragam tetapi besaran komposisinya telah jauh berubah dibanding dengan keadaan pada tahun 2010. Pada tahun 1930, persentase terbesar penduduk Kota Medan adalah etnik Tionghoa (34.69 persen), kemudian disusul etnik Jawa (24,24 persen). Tiga etnik lainnya yang terbilang cukup signifikan adalah etnik Minangkabau (7.11 persen), etnik Melayu (6.87 persen) dan etnik Angkola-Mandailing (6.28 persen). Etnik Batak Toba pada sensus 2010 menduduki posisi terbesar kedua di Kota Medan, namun pada tahun 1930 hanya sebesar 1.12 persen. Etnik Minangkabau dan etnik Melayu yang dulunya merupakan etnik terbanyak ketiga dan keempat, kini telah digeser oleh etnik Angkola-Mandailing dan etnik Toba. Sementara etnik Tionghoa yang dulunya berada posisi terbesar kedua penduduk Kota Medan, kini melorot ke posisi keempat.

Penelusuran tentang jumlah komposisi etnik di Sumatera Utara dapat dilacak sejak tahun 1920, 1930, 1981 sebagaimana diungkap oleh Usman Pelly dalam bukunya *“Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing”*(1994) , adalah sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3. Komposisi Etnik di Medan 1930 dan 1981

Persentase Komposisi Etnik di Kota Medan, 1930 dan 1981		
Etnik	1930	1981
Jawa	24.90 %	29.41 %
Batak Toba	1.07 %	14.11 %
Cina	35.63 %	12.84 %
Mandailing	6.43 %	11,91 %
Minangkabau	7.30 %	10.93 %

Melayu	7.06 %	8.37 %
Karo	0.19 %	3.99 %
Aceh	-	2.19 %
Sunda	1.58 %	1.90 %
Simalungun	-	0.67 %
Dairi	2.34 %	0.24 %
Nias	-	0.18 %
Lain lain	14.28 %	3.04 %
Total	76,584	1.294.132
Sumber: Usman Pelly (1994)		

Pemilihan umum secara harfiah dapat diartikan sebagai sarana bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi politiknya dalam menentukan wakil-wakilnya baik di lembaga legislatif maupun eksekutif juga sebagai sarana berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan politik. Iklim demokrasi Indonesia mengalami perubahan yang signifikan pasca runtuhnya rezim orde baru, kehidupan berdemokrasi mengalami perubahan secara signifikan, rakyat dapat dengan bebas mengeluarkan pendapat dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik yang sangat dibatasi pada masa rezim orde baru.

Pemilihan secara langsung terhadap calon pemimpin daerah oleh masyarakat membawa angin perubahan dengan mendekatkan antara pemilih dengan calon pemimpin daerah, proses dialektika diantaranya dapat berjalan dengan lebih intens, memotong panjangnya jalur administrasi politik yang panjang melalui sistem keterwakilan lembaga legislatif dan dalam artian yang lebih sempit mengembalikan hak-hak dasar masyarakat secara luas untuk berpartisipasi pada proses politik dalam lingkup politik lokal secara demokratis.

Era pemilihan serentak dan langsung ini mulai diinisiasi sejak tahun 2004

meskipun dilakukan secara bertahap dan dilaksanakan di beberapa daerah. Hal ini menjadi penanda semakin berkembangnya demokrasi di negeri ini untuk mewujudkan pemilihan yang bersifat langsung umum, bebas dan rahasia. Beberapa jenis pemilihan umum seperti, pemilihan legislative (DPR RI, DPD, DPRD) serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Kepala Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menandai proses pemilihan langsung dan serentak di negeri ini. Pesta demokrasi yang sebelumnya berlangsung pada setiap lima tahun sekali, namun sejak berlangsungnya pemilihan langsung dan serentak di berbagai wilayah, masyarakat kemudian dihadapkan dengan proses pemilihan yang berlangsung hampir setiap tahun di berbagai daerah tergantung pada berakhirnya masa jabatan lima tahun sebagai kepala daerah maupun keanggotaan di lembaga legislative.

Momentum pesta demokrasi yang membutuhkan dana cukup besar tentunya perlu diatur sedemikian rupa. Oleh karenanya frekwensi dan intensitas pemilihan yang berbeda di masing masing daerah dalam mewujudkan pemilihan yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil; tentunya perlu diatur melalui regulasi agar lebih efisien dan efektif sebagaimana yang termaktub dalam salah satu asas Pemilihan Umum⁴.

Semakin terbukanya secara luas partisipasi masyarakat dalam pemilihan calon kepala daerah pada saat sekarang ini, menarik untuk melihat bahwa hal tersebut ternyata tidak serta-merta disertai meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam memilih pemimpin.

⁴ Salah satu prinsip atau azas Pemilihan Umum sebagaimana terdapat dalam Bab II, pasal 3 point j dan point k, UU No. tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah efisien dan efektif

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Medan, pada 10 tahun terakhir, misalnya, terhitung sejak tahun 2004 hingga 2015 persentase pemilih warga yang hadir di TPS dan menggunakan hak pilihnya menunjukkan angka yang semakin menurun⁵. Pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2015, bahkan angka partisipasi pemilih menurun tajam ke angka 25.38 %, tingkat partisipasi terendah di seluruh Indonesia.

Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah bentuk koreksi atas pelaksanaan sistem pilkada terdahulu yang menggunakan mekanisme keterwakilan masyarakat melalui legislatif (DPRD) yang kemudian memilih calon kepala daerah (baik Gubernur maupun Walikota). Peralihan sistem dari perwakilan ke sistem pilkada langsung secara implisit menggambarkan fungsi perwakilan oleh legislatif tidak berjalan dengan baik dalam menampung aspirasi masyarakat. Melalui azas-azas yang terdapat dalam pilkada langsung yaitu azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil maka pemilihan kepala daerah langsung dianggap telah memenuhi parameter demokrasi yang membuka ruang keterlibatan masyarakat secara luas. Pilkada bukan saja berfungsi sebagai sarana untuk mengganti, akan tetapi juga berfungsi sebagai media penyalur aspirasi rakyat, mengubah kebijakan-kebijakan, mengganti rezim pemerintahan yang ada dan meminta pertanggungjawaban serta keterbukaan.

Terhitung sejak 2004, pesta demokrasi di Indonesia mulai dilakukan secara langsung meskipun belum serentak, prosesnya masih berlangsung secara bertahap. Penyelenggaraan pemilihan ini adalah dimaksudkan bahwa agar kegiatan Pemilihan ini semakin efektif dan efisien⁶. Sehingga dari sisi anggaran dapat

⁵ Trend Data Partisipasi Pemilih di Kota Medan 2004 - 2015

⁶ Sebagaimana termaktub dalam Bab II, pasal 3 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

dihemat. Hingga pada akhirnya nanti, pesta demokrasi “Pemilihan Umum” dilaksanakan cukup sekali saja⁷

Keterlibatan masyarakat secara aktif sebagai pemilih dalam kegiatan Pilkada tidak berjalan secara mulus, represi pada rezim-rezim politik sebelumnya meninggalkan aspek traumatis bagi masyarakat sebagai pemilih, sikap apatis menjadi rujukan masyarakat dalam kegiatan politik secara umum. Dibalik sikap apatis masyarakat dalam kegiatan politik terdapat faktor yang saling terkait yakni; faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor perilaku, faktor calon pemimpin dan lainnya yang menjadikan masyarakat memiliki keenganan menggunakan hak pilih.

Pada bulan Mei s/d July tahun 2015 Lembaga Survey Indonesia (LSI) dengan dukungan dana dari KPU Medan melakukan survey terhadap Perilaku Pemilih di Kota Medan. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk menelusuri lebih jauh tentang perilaku pemilih di Kota Medan kaitannya dengan rendahnya partisipasi masyarakat pada beberapa Pilkada yang berlangsung di daerah ini. Hasilnya terlihat bahwa secara umum rendahnya partisipasi tidak semata mata disebabkan faktor internal terkait kerja penyelenggara Pemilihan, tapi juga terkait dengan faktor eksternal, seperti rasa jenuh masyarakat terhadap proses Pemilihan, sosok pemimpin yang selalu terjerat kasus korupsi serta tidak jalannya proses pendidikan politik oleh Partai Politik⁸.

Pada tahun 2017⁹, Balitbang Kota Medan juga melakukan survey tentang

⁷ Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif yang akan berlangsung pada 17 April 2019 menjadi penanda kesiapan KPU untuk melaksanakan Pemilihan Umum secara langsung dan serentak secara nasional pada tahun 2024

⁸ Kegiatan survey ini dilakukan oleh Lembaga Survey Indonesia. Survey (LSI) perwakilan Sumatera Utara yang menasar responden sebanyak 100 orang; masing mewakili Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Helvetia dan Kecamatan Medan Timur sejak Mei s/d July 2015

⁹ Survey dilakukan oleh Balitbang Kota Medan terhitung sejak bulan Juni s/d September 2017 dengan mengambil sampel sejumlah 400 orang yang berasal dari berbagai kecamatan yang ada di Kota Medan

Partisipasi Pemilih di Kota Medan pada Pilkada Walikota Medan Tahun 2015. Survey ini sebagai wujud kerjasama dan komitmen Pemerintah untuk memberikan masukan kepada KPU Medan terkait rendahnya angka partisipasi pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015. Dari kegiatan survey ini terungkap bahwa alasan pemilih tidak memilih diantaranya adalah karena Pilkada tidak membawa perubahan sebanyak 24.36 % pemilih memberi jawaban; sebanyak 18.59 % menyatakan Pilkada tidak menarik; sebanyak 5.45 % menjawab tidak memilih karena letak TPS terlalu jauh; menjawab sedang bekerja sebanyak 4.17 %; dan menjawab tidak memilih karena tidak mendapat undangan memilih sebanyak 3.53 %; serta menjawab tidak memilih karena tidak terdaftar sebagai pemilih sebanyak 3.21 % dari total jumlah 400 responden yang disurvei,

Pengalaman Kota Medan dalam melaksanakan pesta demokrasi pada sepuluh tahun terakhir dengan trend angka partisipasi yang semakin menurun hingga ke angka 25.38 % pada saat Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 telah menimbulkan berbagai pertanyaan seputar kesadaran warga tentang arti penting pemilihan serta kualitas pemilihan yang berlangsung. Meskipun dari beberapa riset maupun survey yang telah dilakukan mengungkap banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih di Kota Medan. Namun secara Antropologis, penyebab utama rendahnya partisipasi pemilih di Kota Medan belum atau tidak terjawab dengan baik. Oleh karena itu melalui penelitian ini nantinya yang akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan dan metode serta analisis secara Antropologis, diharapkan dapat mengungkap faktor penyebab rendahnya partisipasi pemilih di Kota Medan.

1.2 Identifikasi Masalah

Fokus penelitian ini adalah analisis terhadap faktor sosial budaya rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada Walikota Medan pada tahun 2015. Persoalan partisipasi pemilih yang rendah di Kota Medan menjadi masalah yang terus muncul pada setiap pelaksanaan Pemilihan di daerah ini, baik itu pada pemilihan Gubernur maupun Walikota serta pemilihan Presiden dan Legislatif. Dari data yang dimiliki oleh KPU Kota Medan pada 10 tahun terakhir menunjukkan trend angka partisipasi yang semakin menurun drastis. Puncaknya adalah pada pemilihan Walikota Medan tahun 2015 yang lalu, di mana angka partisipasi pemilih hanya mencapai 25.38 %¹⁰. Ironisnya, trend angka partisipasi ini sedikit lebih baik ketika momentum pemilihan Presiden dan Legislatif, meskipun tidak mencapai target angka partisipasi secara nasional.

Rendahnya angka partisipasi di Kota Medan pada setiap pemilihan menjadi menarik untuk diteliti. Oleh karenanya, meskipun tema penelitian ini sudah berlangsung dari segi waktu (sinkronik), namun peneliti melihat relevansinya masih cukup kuat secara diakronik untuk menelusuri sisi lain yang belum terungkap dengan baik terkait rendahnya partisipasi pemilih dalam setiap pelaksanaan pesta demokrasi di Kota Medan sekaligus nantinya dapat dijadikan acuan untuk melihat proses Pemilihan Gubernur 27 Juni tahun 2018 dan Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif 17 April tahun 2019. Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting dalam demokrasi. Demokrasi merupakan penanda

¹⁰ Trend Partisipasi Pemilih di Kota Medan 2004 - 2015

atau ciri khas dari sebuah masyarakat modern dalam hal memilih dan menentukan pemimpin .

Jika pesta demokrasi (baca: Pemilihan Umum) dimaknai sebagai sebuah wujud dari masyarakat modern dalam rangka memaknai demokrasi khususnya dalam rangka memilih pemimpin, maka seharusnya diekspresikan dengan cara-cara yang modern juga dalam arti dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab sebagai warga negara yang dijamin hak politiknya oleh negara. Sayangnya pesta demokrasi sebagai gambaran masyarakat modern tidak serta merta disambut dan dilaksanakan dengan cara yang mencirikan masyarakat modern, seperti kesadaran, individualitas dan rasionalitas. Sebaliknya yang terjadi adalah kecenderungan untuk bersikap kolektifitas, primordialitas dan emosional.

Adapun faktor sosial yang dimaksudkan disini adalah proses interaksi sosial yang berpotensi mempengaruhi pemilih untuk hadir dan tidak hadir di TPS. Selain faktor usia juga menjadi bagian dari faktor sosial yang akan dilihat khususnya pada pemilih generasi muda dan pemilih generasi tua serta berdasarkan jenis kelamin. Sedangkan faktor budaya disini lebih dimaksudkan pada orientasi pemilih yang dipengaruhi oleh adanya latar belakang etnik dan agama serta hubungan emosional antara pemilih dengan calon yang akan dipilih..

Negara melalui UU dan Peraturan yang ada menjamin sepenuhnya hak warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik melalui kegiatan Pemilihan Umum. Satu orang, satu suara dan satu nilai (*one person, one vote, one value: opovov*) merupakan sebuah pengakuan terhadap hak warga negara dalam menjalankan hak pilihnya. Oleh karenanya momentum Pemilihan Umum merupakan wujud konkrit dari partisipasi warga dalam kehidupan politik.

Penggunaan anggaran yang cukup besar dalam setiap pesta demokrasi seharusnya diimbangi pula dengan tingkat kehadiran warga yang tinggi dalam setiap penyelenggaraan pemilihan.. Sehingga pesta demokrasi benar benar dirasakan manfaat dan kehadirannya ditengah tengah masyarakat dalam mewujudkan sebuah perubahan. Salah satu penanda tumbuh kembangnya demokrasi di suatu negara dapat dilihat dari proses demokrasi yang berlangsung di dalam masyarakat. Oleh karenanya keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan politik menjadi penting untuk dilihat.

1.3. Perumusan Masalah

1. Bagaimana sebaran tingkat partisipasi pemilih yang ada di tingkat kelurahan di Kota Medan pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2015 .
2. Pada kelompok etnik mana saja terdapat partisipasi pemilih yang rendah pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2015
3. Bagaimana faktor sosial dan faktor budaya menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan pada tahun 2015.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Memetakan sebaran tingkat partisipasi pemilih yang ada di masing masing kelurahan pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2015 .
2. Mengidentifikasi pada kelompok etnik mana saja terdapat partisipasi pemilih yang rendah pada pemilihan Walikota Medan tahun 2015
3. Menganalisis faktor sosial budaya penyebab rendahnya partisipasi pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan pada tahun 2015.

1.5. Manfaat Penelitian :

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam pengembangan ilmu Antropologi serta memperluas pemahaman mengenai urgensi dan relevansi faktor sosial budaya dalam penyelenggaraan Pilkada Walikota di Kota Medan tahun 2015.
2. Secara khusus penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh jawaban tentang faktor sosial budaya terkait rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Medan tahun 2015
3. Secara praktis menjadi bahan refleksi terhadap proses pemilihan yang telah sedang dan akan berlangsung dalam setiap pesta demokrasi Pemilihan di Kota Medan baik di tingkat pemilih (*voters*), penyelenggara pemilihan, partai politik, pemerintah dan masyarakat dalam arti luas